



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

UPAYA MENEKAN PREVALENSI STUNTING

Hartini Retnaningsih

Peneliti Utama

hartini.retnaningsih@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Stunting adalah gangguan pertumbuhan fisik pada anak, dengan tubuh sangat pendek atau kerdil sebagai salah satu indikasinya. Anak stunting juga ditandai dengan adanya gangguan pada perkembangan otak. Stunting tidak hanya terjadi pada masyarakat miskin, tetapi juga karena pola pengasuhan dan pengetahuan gizi yang rendah.

Stunting masih menjadi masalah yang serius di Indonesia. Di Manggarai Timur, NTT, hingga Februari 2021 terdapat sebanyak 2.767 balita (11,6%) dalam kondisi stunting. Dari jumlah tersebut, sebanyak 154 balita menderita gizi buruk, dan 958 balita menderita gizi kurang. Sementara di Banten, berdasarkan hasil survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, Pandeglang merupakan daerah dengan stunting tertinggi yaitu 37,8% dan Kota Tangerang merupakan daerah dengan stunting terendah yaitu 15,3%. Untuk Provinsi Banten, angka stunting sebesar 24,5%. Angka tersebut menurun cukup signifikan jika dibanding dengan tahun 2018 sebesar 31,5%. Provinsi Banten menargetkan *zero new stunting* pada tahun 2023 mendatang.

WHO telah menetapkan standar, total anak stunting di suatu negara maksimal 20%. Namun angka prevalensi stunting di Indonesia saat ini mencapai 24,4%. Berdasarkan studi *Frieslandcampina* yang dilakukan *Frisian Flag* Indonesia, Indonesia merupakan salah satu negara dengan stunting tertinggi di Asia Tenggara, yaitu 28,4%. Angka tersebut didapat melalui *South East Asian Nutrition Surveys* kedua (SEANUTS II) terkait status gizi, perilaku, dan gaya hidup anak-anak di beberapa negara Asia Tenggara tahun 2019 hingga 2021.

Permasalahan stunting harus segera diatasi. Stunting bukan saja merupakan masalah kondisi fisik, tetapi juga berkaitan dengan pertumbuhan kognitif dan prestasi belajar anak. Stunting dapat menjadi ancaman besar bagi kualitas sumber daya manusia, yaitu potensi menurunkan daya saing bangsa di masa depan. Untuk itu, kita apresiasi Pemerintah yang terus berupaya menekan angka prevalensi stunting dan berupaya mewujudkan target prevalensi stunting hingga 14% pada tahun 2024.

Untuk menekan prevalensi stunting, diperlukan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik adalah optimalisasi surveilans gizi, edukasi gizi, distribusi tablet penambah darah bagi remaja putri, serta pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak di Posyandu. Selain itu, juga dengan distribusi vitamin A, peningkatan pemberian makan bayi dan anak, dan lainnya. Sementara itu, intervensi gizi sensitif mencakup pemberian pangan bergizi, seimbang dan aman, peningkatan akses air minum, serta peningkatan pelayanan keluarga berencana.

Upaya mencegah dan menekan prevalensi stunting perlu dilakukan dengan segenap potensi yang ada, salah satunya dengan memaksimalkan peran Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Puskesmas perlu bekerja secara maksimal dengan menggunakan metode proaktif. Salah satunya melalui kegiatan penyuluhan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memahami dan bersedia berpartisipasi dalam upaya pencegahan stunting .

Atensi DPR

Mengingat stunting merupakan ancaman bagi masa depan sumber daya manusia Indonesia, maka DPR RI perlu memberikan perhatian serius terhadap masalah stunting. Melalui Komisi terkait yaitu Komisi IX, X, dan XI DPR RI, perlu terus melakukan pengawasan dan mendorong pemerintah untuk secara serius mengatasi masalah stunting. DPR RI perlu mendorong dan mendukung upaya pemerintah dalam menekan dan menurunkan prevalensi stunting, baik yang dilakukan melalui intervensi spesifik maupun intervensi gizi sensitif. Komisi IX DPR RI perlu terus melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan program-program kesehatan anak, terutama bayi dan balita. Komisi X DPR RI perlu mendorong Mendikbudristek untuk memberi perhatian khusus bagi pendidikan anak usia dini, serta memberikan literasi kepada orang tua siswa terkait pencegahan stunting. Komisi XI DPR RI perlu mendukung melalui pembahasan bersama dengan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang memadai bagi upaya pencegahan stunting.

Sumber

detik.com, 22 Juni 2022;
kemendikbud.go.id, 19 Juni 2022;
kompas.com, 21 & 22 Juni 2022;
Media Indonesia, 17 Juni 2022;
mediaindonesia.com, 17 & 18 Juni 2022;
suara.com, 21 Juni 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Edmira Rivani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022